

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, sebagian besar jumlah saham dimiliki secara dominan oleh individu atau kelompok tertentu dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Individu atau kelompok yang memiliki jumlah saham yang dominan tersebut disebut sebagai pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas dapat memilih pihak-pihak yang akan mengisi posisi manajemen perusahaan dan juga turut andil dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Hal ini menyebabkan pemegang saham mayoritas bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai operasi perusahaan dibandingkan pemegang saham minoritas.

Permasalahan keagenan antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham pun dapat muncul karena adanya asimetri informasi. Akan tetapi, pada kasus ini, permasalahan keagenan yang cenderung terjadi antara pihak manajemen dengan pemegang saham (tipe I) bergeser menjadi permasalahan keagenan antara pihak manajemen dan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (tipe II). Hal ini karena pemegang saham mayoritas bisa mendapatkan informasi yang lebih baik dari pihak manajemen yang ditunjuknya. Dengan informasi yang dimilikinya, pemegang saham mayoritas dapat mendorong praktik-praktik yang menguntungkan diri mereka, tetapi merugikan pemegang saham minoritas. Salah

satu caranya adalah dengan melakukan transaksi pihak berelasi untuk melakukan praktik ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas.

PSAK 7 (revisi 2010) mengenai Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi mendefinisikan pihak-pihak berelasi sebagai orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (atau yang disebut entitas pelapor). PSAK 7 (revisi 2010) juga mendefinisikan transaksi pihak berelasi sebagai suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Menurut Gordon et al. (2004), Cheung et al. (2009), serta Kohlbeck dan Mayhew (2010), transaksi pihak berelasi dapat dikategorikan menjadi transaksi pihak berelasi yang bersifat menguntungkan (*efficient RPT*) dan transaksi pihak berelasi yang bersifat merugikan (*abusive RPT*).

Transaksi pihak berelasi dianggap dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya ketika melakukan transaksi pihak berelasi, sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat. Hal ini membuat transaksi pihak berelasi menjadi bersifat positif (*efficient RPT*). Akan tetapi, transaksi pihak berelasi juga dianggap dapat menimbulkan kerugian (*abusive RPT*). *Abusive RPT* dapat dilakukan melalui *tunneling activities*. Pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan perusahaan sehingga aset perusahaan dapat dialihkan keluar untuk kepentingan para pemegang saham mayoritas. Aktivitas *tunneling* dapat merugikan pemegang saham minoritas, sehingga transaksi pihak berelasi yang dilakukan menjadi bersifat merugikan. Baik transaksi pihak berelasi yang

dilakukan merupakan *efficient RPT* maupun *abusive RPT*, keduanya membentuk besaran transaksi pihak berelasi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besaran transaksi pihak berelasi. Beberapa di antaranya yaitu tata kelola, tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi, dan kualitas audit. *Good corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang diterapkan di dalam perusahaan untuk mengurangi masalah keagenan. Terdapat prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dapat dilakukan di dalam perusahaan, yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Jika perusahaan melakukan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik, maka tingkat *abusive RPT* akan menurun karena praktik *abusive RPT* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Penelitian Utama dan Utama (2014) menunjukkan bahwa besaran transaksi pihak berelasi, dalam hal ini, kecenderungannya yaitu transaksi pihak berelasi yang bersifat menguntungkan (*efficient RPT*) akan meningkat jika tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi berpengaruh semakin tinggi. Besaran transaksi pihak berelasi akan tinggi karena *efficient RPT* dilaporkan di dalam laporan keuangan.

Kualitas audit biasanya diukur berdasarkan kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan tertentu. Jika kantor akuntan publik yang mengaudit adalah bagian dari *Big 4*, maka kualitas audit yang dihasilkan akan baik sehingga laporan keuangan yang diterbitkan juga berkualitas lebih baik. Jika suatu perusahaan

diaudit oleh kantor akuntan publik *Big 4*, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih lengkap dan akurat, sehingga besaran transaksi pihak berelasi yang dilaporkan akan lebih besar.

Penelitian mengenai transaksi pihak berelasi masih jarang dilakukan di Indonesia, sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini dibuat dengan mengacu pada penelitian Utama (2015). Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah cara pengukuran tata kelola yang menggunakan penilaian skor dari empat dimensi *Good Corporate Governance*, yang terdiri dari *board of commissioners*, *management*, *audit committee*, dan *shareholder*. Selain itu, terdapat juga variabel lainnya yang diteliti yaitu variabel kualitas audit. Penelitian ini berkontribusi dengan mengukur tata kelola dari segi kualitasnya, tidak hanya dari segi keberadaannya, dan juga meneliti pengaruh kualitas audit terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tata kelola, tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi, kualitas audit, dan besaran transaksi pihak berelasi, peneliti membuat penelitian dengan judul “**Pengaruh Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, dan Kualitas Audit terhadap Besaran Transaksi Pihak Berelasi**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap besaran transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan?

2. Apakah tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap besaran transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap besaran transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap besaran transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Menguji apakah tingkat pengungkapan transaksi berelasi berpengaruh terhadap besaran transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Menguji apakah kualitas audit berpengaruh terhadap besaran transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi dunia akademis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang terkait dengan transaksi pihak berelasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan besaran transaksi pihak berelasi.

1.5. Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Variabel independen yang diteliti hanyalah tata kelola perusahaan, tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi, dan kualitas audit.
2. Sampel penelitian hanya sebatas pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 – 2017.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab II menjelaskan mengenai definisi konsep dasar, telaah literatur sehubungan dengan variabel yang diteliti, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, model empiris penelitian, definisi variabel operasional, dan metode analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V menjelaskan mengenai kesimpulan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

